

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323 SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor

: B/41/AA.04/2021

05 Juli 2021

Sifat Lampiran: 1 berkas

: Biasa

: Kebijakan Pelaksanaan Evaluasi SAKIP

Tahun 2021

Yth.

Inspektur/Kepala Biro Organisasi Provinsi (daftar terlampir)

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami akan melakukan evaluasi implementasi SAKIP terhadap instansi pemerintah (IP). Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi tersebut, serta melihat perkembangan terkini terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kami bermaksud menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021 untuk sementara tidak dilakukan bersama Inspektorat/Biro Organisasi Provinsi sebagaimana telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
- 2. Melihat perkembangan terkini terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang belum sepenuhnya berakhir dan pemotongan anggaran yang signifikan, pelaksanakan "Field Evaluation" ke lokasi IP diganti dengan metode teleconference;
- 3. Pelaksanaan "Field Evaluation" ke lokasi hanya boleh dilaksanakan untuk IP prioritas atas persetujuan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas), serta mematuhi protocol covid perjalanan dinas dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran.
- 4. Pelaksanaan evaluasi pada IP non prioritas dilakukan dengan metode "Desk Evaluation". Evaluator melakukan identifikasi dan penilaian atas kelengkapan dan kualitas dokumen kinerja yang telah disampaikan oleh IP dengan memperhatikan laporan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

ERWAN AGUS PURWANTO

Tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi